

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2013

PENGESAHAN. Persetujuan. Kerjasama Teknik.
Republik Argentina.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA
TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dan Argentina perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama teknik bagi pengembangan kapasitas dua negara;
- b. bahwa di Buenos Aires, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah ditandatangani Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Argentine Republic*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 di Buenos Aires yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA TEKNIK
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mempertimbangkan kepentingan yang saling menguntungkan untuk memperluas dan mendukung kerjasama bilateral antara kedua negara melalui kerjasama teknik;

Meyakini akan kebutuhan untuk menekankan mengenai pembangunan berkesinambungan;

Mengakui keuntungan timbal-balik dari kerjasama teknik dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; kebutuhan dan kapasitas pada masing-masing kedua pihak, dan keinginan untuk membangun kerjasama yang mendorong kemajuan teknik;

Dipandu oleh keinginan untuk memperkuat keberadaan hubungan yang bersahabat untuk meningkatkan perluasan kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
TUJUAN**

Para Pihak akan meningkatkan dan membangun kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan tanggung jawab bersama dan keuntungan timbal balik, sesuai dengan Persetujuan ini dan ketentuan perundangan-undangan masing-masing Pihak.

**PASAL II
CAKUPAN KERJASAMA**

Kerjasama teknik yang dimaksud dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pertukaran penasehat, konsultan dan teknisi;
- b) Pelaksanaan seminar, konferensi dan pertemuan;
- c) Pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi;
- d) Pertukaran informasi, pertukaran pelajaran dan pertukaran hasil penelitian;
- e) Bentuk lain kerjasama dalam bidang kerjasama teknik sebagaimana yang disepakati bersama oleh para Pihak.

**PASAL III
MEKANISME KERJASAMA TRILATERAL**

1. Guna mencapai tujuan dari Persetujuan ini, para Pihak dapat memanfaatkan mekanisme kerjasama trilateral, dengan cara kemitraan trilateral dengan negara-negara lain, organisasi internasional dan lembaga-lembaga regional.
2. Kerjasama trilateral tersebut harus disetujui oleh kedua Pihak dan diatur dalam pengaturan terpisah.

**PASAL IV
KELOMPOK KERJA BERSAMA**

1. Dalam rangka mendorong dan mengkoordinasi implementasi Persetujuan ini, para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang akan terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dari para Pihak.
2. Republik Argentina menunjuk Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional dan Keagamaan untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini.
3. Republik Indonesia menunjuk Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkoordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini.
4. Kelompok Kerja Bersama akan dibentuk oleh kedua otoritas pemerintah di atas maupun oleh institusi atau organisasi yang ditentukan oleh para Pihak yang terlibat dalam implementasi program dan proyek yang dibentuk di bawah kerangka Persetujuan ini. Kelompok ini akan bertemu pada saat dianggap perlu atas kesepakatan bersama, baik di Republik Argentina dan di Republik Indonesia.
5. Kelompok Kerja Bersama secara khusus akan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menganalisa kemajuan kerjasama teknik antara kedua Pihak;
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara negara-negara partisipan;
 - c. Melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal teknik antara kedua negara;
 - d. Menganalisa kemajuan kerjasama dan menyarankan ukuran untuk memperkuat kerjasama tersebut;
 - e. Memformulasi proposal dan membuat rekomendasi kepada masing-masing Pemerintah untuk keuntungan para Pihak di masa depan melalui kerjasama timbal balik.

PASAL V IMPLEMENTASI

1. Proyek kerjasama teknik di bawah Persetujuan ini akan diimplementasikan melalui Program-Program Eksekutif yang disetujui bersama oleh para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. Komite pelaksana dan koordinator dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk implementasi proyek-proyek tersebut di atas juga harus dibentuk oleh Kelompok Kerja Bersama.
3. Para Pihak akan, secara bersama-sama atau terpisah, membiayai implementasi proyek-proyek dan dapat juga mencari pendanaan dari organisasi internasional, dana perwalian, program regional dan internasional dan penyanggah dana lainnya sesuai persetujuan kedua Pihak.
4. Para Pihak dapat meminta dukungan institusi pemerintah maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, lembaga kerjasama teknik, dana regional dan internasional dan program-program di dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang dibentuk di bawah Persetujuan ini.

PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Apabila hasil dari suatu kegiatan di bawah Persetujuan ini menyebabkan hak kekayaan intelektual, maka hak tersebut akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di masing-masing wilayah kedaulatan para Pihak. Perlindungan hak kekayaan intelektual dihasilkan dari kegiatan di bawah Persetujuan ini akan diatur dalam pengaturan terpisah.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama yang dilakukan di bawah kerangka Persetujuan ini dapat digunakan atau diserahkan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua Pihak.

PASAL VII KERAHASIAAN

Setiap Pihak akan menjamin bahwa dokumen, informasi dan data lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan implementasi Persetujuan ini tidak akan diberikan atau dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain.

PASAL VIII PIHAK KETIGA

Dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana disetujui secara bersama oleh para Pihak, lembaga pemerintah dan institusi negara ketiga dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek dan program-program, sesuai dengan Persetujuan ini.

PASAL IX FASILITASI

1. Masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturannya akan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan khusus berkaitan dengan visa masuk dan ijin tinggal, dan fasilitasi administrative lainnya yang dibutuhkan.
2. Pengecualian dan pembebasan pajak akan disesuaikan dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku dari masing-masing Pihak.
3. Para Pihak akan memberikan fasilitasi administratif yang dibutuhkan untuk keluar masuknya peralatan dan bahan-bahan yang terkait dengan proyek dan program sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari para Pihak.

PASAL X PEMBIAYAAN

Kecuali hal lain disepakati, pembiayaan berkaitan dengan pengiriman orang akan ditanggungkan sebagai berikut:

- a. Biaya perjalanan ke wilayah Pihak lainnya akan ditanggungkan kepada Pihak Pengirim;
- b. Akomodasi, tunjangan harian dan transportasi lokal untuk pelaksanaan proyek dan program akan ditanggungkan kepada Pihak Penerima;
- c. Pihak Pengirim akan menanggung biaya asuransi kesehatan sebelum seorang ahli bepergian.

PASAL XI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang dapat muncul berkaitan dengan interpretasi dan/atau implementasi dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL XII KAITAN DENGAN PERSETUJUAN LAINNYA

Hal-hal yang diatur dalam Persetujuan ini tidak berdampak terhadap hak dan kewajiban para Pihak dalam kaitan dengan persetujuan internasional lainnya dimana mereka menjadi pihak.

PASAL XIII AMANDEMEN

Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak. Amandemen tersebut akan diberlakukan dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam pasal XIV dan akan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.

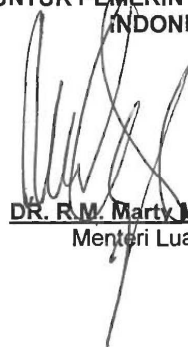
**PASAL XIV
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN**

1. Persetujuan ini akan diberlakukan pada tanggal notifikasi terakhir dimana para Pihak telah saling memberikan notifikasi bahwa masing-masing Pihak telah menyelesaikan prosedur hukum internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum pembaharuan secara otomatis. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dari kegiatan, program atau proyek yang sedang berlangsung sebagai implementasi dari Persetujuan ini.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini akan berlaku dalam 6 (enam) bulan setelah notifikasi tersebut.

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Buenos Aires pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, dalam rangkap dua naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA**



DR. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
ARGENTINA**



Héctor Marcos Timerman
Menteri Luar Negeri, Perdagangan
Internasional dan Agama



REPUBLIK INDONESIA

**ACUERDO
DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

El Gobierno de la República de y el Indonesia Gobierno de la República Argentina, en adelante "las Partes";

Considerando el interés mutuo de ampliar y promover las relaciones bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;

Convencidos de la necesidad de poner énfasis en el desarrollo sustentable;

Reconociendo las ventajas recíprocas de la cooperación técnica en áreas de interés común y las necesidades y capacidades de ambas Partes y deseos de desarrollar una cooperación que estimule el progreso tecnológico;

Guiados por el deseo de fortalecer las relaciones de amistad existentes para promover la expansión de la cooperación técnica entre los dos países sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el respeto de su soberanía;

Conforme a las leyes y normas vigentes en sus respectivos países;

Por el presente acuerdan lo siguiente:

**ARTÍCULO I
OBJETIVO**

Las Partes promoverán y desarrollarán la cooperación técnica entre los dos países sobre la base de la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, conforme al presente Acuerdo y a sus respectivas legislaciones nacionales.

**ARTÍCULO II
ALCANCE DE LA COOPERACIÓN**

Dicha cooperación técnica podrá incluir las siguientes actividades:

- a) intercambio de asesores, consultores y técnicos;
- b) organización de seminarios, conferencias y reuniones;
- c) capacitación y desarrollo de expertos y técnicos;
- d) intercambio de información, de estudios y de resultados de investigaciones;
- e) cualquier otra modalidad de cooperación que pueda convenirse entre las Partes.

**ARTÍCULO III
MECANISMO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR**

1. En aras de la consecución de los objetivos del presente Acuerdo, las Partes podrán aprovechar los mecanismos de la cooperación triangular, por medio de la asociación triangular con otros países, organizaciones internacionales y organismos regionales.
2. Dicha cooperación triangular será acordada por ambas Partes y regulada por acuerdos separados.

**ARTÍCULO IV
GRUPO DE TRABAJO MIXTO**

1. A fin de promover y coordinar la implementación del presente Acuerdo, las Partes convienen establecer un Grupo de Trabajo Mixto que estará compuesto por representantes de los Gobiernos de las Partes.
2. La República Argentina designa a la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para preparar, asesorar, coordinar, realizar el seguimiento, facilitar y evaluar las actividades que se desarrollarán conforme al presente Acuerdo.
3. La República de Indonesia designa a la Dirección de Cooperación Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, en coordinación con la Oficina de Cooperación Técnica de la Secretaría de Estado de la República de Indonesia, para preparar, asesorar, coordinar, realizar el seguimiento, facilitar y evaluar las actividades que se desarrollarán conforme al presente Acuerdo.
4. El Grupo de Trabajo Mixto estará formado por las autoridades mencionadas más arriba y por las instituciones u organizaciones designadas por las Partes involucradas en la implementación de los programas y proyectos desarrollados en el marco del presente Acuerdo.
Se reunirá cuando se considere necesario por mutuo acuerdo, alternadamente en la República Argentina y en la República de Indonesia.
5. El Grupo de Trabajo Mixto tendrá, en particular, las siguientes funciones:
 - a. Analizar el avance de la cooperación técnica entre ambas Partes;
 - b. Facilitar la cooperación entre los países participantes;
 - c. Intercambiar información sobre temas técnicos entre ambos países;
 - d. Analizar el avance de la cooperación y proponer medidas para fortalecer dicha cooperación;
 - e. Formular propuestas y recomendaciones a los respectivos gobiernos para el beneficio futuro de ambos países a través de la cooperación mutua.

ARTÍCULO V IMPLEMENTACIÓN

1. Los proyectos de cooperación técnica conforme al presente Acuerdo se implementarán a través de Programas Ejecutivos que serán mutuamente acordados por las Partes a través de la vía diplomática.
2. El Grupo de Trabajo Mixto establecerá también los comités de ejecución y coordinación y demás componentes necesarios para la implementación de los proyectos antes mencionados.
3. Las Partes, en forma conjunta o por separado, financiarán la implementación de los proyectos y podrán también buscar financiamiento por parte de organismos internacionales, fondos fiduciarios, programas internacionales y regionales y otros donantes, con la aprobación de ambas Partes.
4. Las Partes podrán solicitar el apoyo de instituciones del sector público y privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, agencias de cooperación técnica, fondos y programas regionales e internacionales para la implementación de las actividades establecidas conforme al presente Acuerdo

ARTÍCULO VI DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Si, como resultado de las actividades en virtud del presente Acuerdo, surgieran derechos de propiedad intelectual, estarán sujetos a las leyes y reglamentaciones nacionales relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual de los territorios respectivos de las Partes. La Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual que resulten de actividades de conformidad con el presente Acuerdo, será convenida en un acuerdo por separado.
2. Los resultados obtenidos de las actividades de cooperación llevadas a cabo en el marco del presente Acuerdo podrán ser utilizados o transmitidos a terceros con el consentimiento previo de ambas Partes.

ARTÍCULO VII CONFIDENCIALIDAD

Cada una de las Partes garantizará que los documentos, información y otros datos obtenidos en el curso de la implementación del presente Acuerdo no serán revelados ni transmitidos a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte.

ARTÍCULO VIII TERCEROS

En caso de corresponder, según lo mutuamente acordado por las Partes, personal técnico, organismos gubernamentales e instituciones de terceros países podrán participar en los proyectos y programas previstos por el presente Acuerdo.

ARTÍCULO IX FACILIDADES

1. Cada Parte, conforme a sus leyes y reglamentaciones, le otorgará a la otra Parte un tratamiento favorable con relación a las visas de entrada y los permisos de estadía y otras facilidades administrativas según sea necesario;
2. Las exenciones y ventajas impositivas se otorgarán de conformidad con las leyes y reglamentaciones impositivas vigentes en cada una de las Partes.
3. Las Partes brindarán las facilidades administrativas necesarias para el ingreso y la salida de los equipos y materiales relacionados con los proyectos y programas conforme a las leyes y normas aplicables de las Partes.

ARTÍCULO X GASTOS

A menos que se acuerde otra cosa, los gastos relacionados con el envío de personal se sufragarán de la siguiente manera:

- a. Los gastos de viaje al territorio de la otra Parte correrán por cuenta de la Parte de Origen.
- b. Los gastos de alojamiento, viáticos y transporte local para la ejecución de los programas y proyectos correrán por cuenta de la Parte Anfitriona.
- c. La Parte de Origen acepta prever la cobertura de los gastos de seguro médico antes del viaje de un experto.

ARTÍCULO XI MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja con relación a la interpretación y/o implementación del presente Acuerdo se resolverá amigablemente mediante consultas y negociaciones entre las Partes a través de la vía diplomática

ARTÍCULO XII RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán los derechos u obligaciones de las Partes emergentes de otros acuerdos internacionales de los cuales sean parte.

ARTÍCULO XIII ENMIENDA

El presente acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento mediante consentimiento mutuo por escrito entre las Partes. Dichas modificaciones entrarán en vigor de la misma manera en que se estipula según el Artículo XIV y será parte integral del presente Acuerdo.

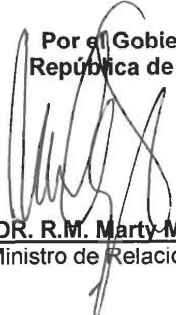
**ARTÍCULO XIV
ENTRADA EN VIGOR**

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación en la que las Partes se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de los procedimientos legales internos para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá validez por cinco (5) años y se renovará automáticamente por períodos sucesivos similares, a menos que una de las Partes informe a la otra, a través de la vía diplomática, su decisión de terminarlo, por lo menos seis meses antes de su renovación automática. La terminación del presente Acuerdo no afectará la validez de las actividades, programas o proyectos de cooperación realizados en virtud del presente.
3. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo mediante notificación a la otra Parte a través de la vía diplomática. La terminación se hará efectiva seis (6) meses después de dicha notificación.

En prueba de conformidad los abajo firmantes han suscripto el presente Acuerdo.

Hecho en Buenos Aires, el 24 del agosto de 2011, en dos originales en español, inglés e indonesio, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia prevalecerá el texto en idioma inglés.

Por el Gobierno de la
República de Indonesia


DR. R.M. Marty M. Natalegawa
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la
República Argentina


Hector Marcos Timerman
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
ON TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic, hereinafter referred to as the Parties;

Considering the mutual interest to expand and promote bilateral relations between both countries through technical cooperation;

Convinced of the need to put emphasis on sustainable development;

Recognizing the reciprocal advantages of technical cooperation in areas of common interest; the needs and capacities within both Parties, and wishing to develop cooperation that stimulates technical progress;

Guided by the desire to strengthen the existing friendly relations to promote the expansion of the technical cooperation between the two countries based on equality, mutual benefit and respect for their sovereignty;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

Hereby agreed as follows :

**ARTICLE I
OBJECTIVE**

The Parties shall promote and develop technical cooperation between the two countries on the basis of shared responsibility and mutual benefit, in accordance with this Agreement and their respective domestic legislation.

**ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION**

Such technical cooperation may include the following activities:

- a) Exchange of advisors, consultants and technicians;
- b) Organization of seminars, conferences and meetings;
- c) Training and development of experts and technicians;
- d) Exchange of information, exchange of studies and exchange of research results;
- e) Any other form of cooperation in the area of technical cooperation as mutually agreed by the Parties.

**ARTICLE III
TRIANGULAR COOPERATION MECHANISM**

1. In pursuing the goals of this Agreement, the Parties may benefit from triangular cooperation mechanisms, by means of triangular partnership with other countries, international organizations and regional agencies.
2. Such triangular cooperation shall be agreed by both Parties and regulated in separate arrangement.

**ARTICLE IV
JOINT WORKING GROUP**

1. In order to promote and coordinate the implementation of this Agreement, the Parties agree to establish a Joint Working Group which shall be composed of representative of the Government of the Parties.
2. The Argentine Republic designates the General Directorate of International Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship to prepare, advise, coordinate, follow up, facilitate and assess the activities to be developed under this Agreement.
3. The Republic of Indonesia designates the Directorate of Technical Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in coordination with Bureau for Technical Cooperation of the State Secretariat of the Republic of Indonesia to prepare, advise, coordinate, follow up, facilitate and assess the activities to be developed under this Agreement.
4. The Joint Working Group shall be formed by the authorities mentioned above as well as by the institutions or organizations designated by the Parties involved in the implementation of the programs and projects developed in the framework of this Agreement. It shall meet when considered necessary by mutual agreement, alternatively in the Argentine Republic and in the Republic of Indonesia.
5. The Joint Working Group shall have, in particular, the following functions:
 - a. To analyze the progress of the technical cooperation between the two Parties;
 - b. To facilitate cooperation between the participating countries;
 - c. To exchange information on technical matters between the two countries;
 - d. To analyze the progress of the cooperation and suggest measures to strengthen such cooperation;
 - e. To formulate proposals and make recommendations to the respective Governments for the future benefit of the Parties through mutual cooperation.

ARTICLE V IMPLEMENTATION

1. The projects on technical cooperation under this Agreement shall be implemented through Executive Programs to be mutually agreed by the Parties through diplomatic channels.
2. The executing and coordinating committees and other components that are necessary for implementing the aforementioned projects shall also be established by the Joint Working Group.
3. The parties shall, jointly or separately, finance the implementation of the projects and may also seek funding from international organizations, trust funds, regional and international programs and other donors upon the approval of both Parties.
4. The parties may request the support of public and private sector institutions, non-governmental organizations, international organizations, technical cooperation agencies, regional and international funds and programs in the implementation of activities established under this Agreement.

ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. If as a result of the activities under this present agreement intellectual property rights arise, they will be subjected to the applicable national laws and regulations concerning the protection of intellectual property right in the respective territories of the Parties. The Protection of Intellectual Property Rights resulted from activities under this Agreement shall be arranged in separate arrangement.
2. The results obtained from the cooperation activities carried out in the framework of the present agreement could be used or passed on the others with the prior written consent of both Parties.

ARTICLE VII CONFIDENTIALITY

Each Party shall guarantee that the documents, information and other data obtained in the course of the implementation of this Agreement shall neither be released nor transmitted to third parties without previous written consent of the other Party.

ARTICLE VIII THIRD PARTIES

In appropriate cases, as mutually agreed by the Parties, technical personnel, government agencies and institutions of third countries may participate in projects and programs, pursuant to this Agreement.

ARTICLE IX FACILITATION

1. Either party in accordance with its laws and regulations shall extend to other Party a favourable treatment with respect to entry visa and stay permit, and other administrative facilities as required.
2. Tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing tax law and regulations of each Party.
3. The Parties shall provide the necessary administrative facilities for the entry and exit of equipments and materials related to the projects and programs in accordance with the Parties applicable laws and regulations.

ARTICLE X EXPENSES

Unless otherwise agreed upon, the expenses related to the sending of personnel shall be borne as follows:

- a. Travel expenses to the territory of the other Party shall be borne by the Sending Party;
- b. Accommodation, per diem allowances and local transportation expenses for the execution of programs and projects shall be borne by the Receiving Party;
- c. The Sending Party shall provide medical insurance before its personnel travelling to the Receiving Party.

ARTICLE XI DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

Any dispute that may arise regarding the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE XII RELATIONS TO OTHER AGREEMENT

The provisions of this Agreement shall have no effect on the rights or duties of the Parties in relation to other international agreements to which they are parties.

ARTICLE XIII AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force in the same manner as stipulated in article XIV and shall form as integral part of this Agreement.

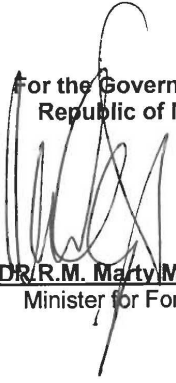
**ARTICLE XIV
ENTRY INTO FORCE**

1. This agreement shall enter into force on the date of the latest notification by which the Parties have notified each other that their internal legal procedures for the entry into force of this agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall be valid for a period of five (5) years and shall be renewed automatically for successive five-year periods, unless one of the Parties informs the other, through diplomatic channels, of its decision to terminate, at least six (6) months prior to its automatic renewal. The termination of this Agreement shall not affect the validity of the ongoing activities, programs or projects of cooperation implemented under this Agreement
3. Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect six (6) months after such notification.

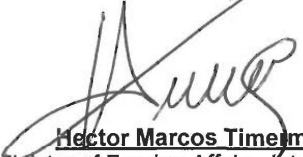
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Buenos Aires, on August 24th of 2011, in two original copies, in the Indonesian, Spanish and English languages, all text being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Republic of Indonesia**


DR R.M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

**For the Government of the
Argentine Republic**


Hector Marcos Timerman
Minister of Foreign Affairs, International
Trade and Worship